

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang menganut sistem demokrasi, agar demokrasi dapat diterapkan dengan baik perlu adanya pihak-pihak yang mendukung, seperti pemerintahan. Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, pemerintah seharusnya semakin transparan dan akuntabel terhadap pengelolaan dana keuangan negara, karena tuntutan masyarakat kepada pemerintah agar terwujudnya pemerintah yang baik, jujur dan bersih. Demi terwujudnya pemerintah yang baik, jujur dan bersih pemerintah haruslah berkompeten dalam melaksanakan fungsi pengawasan intern yang andal. Sistem pengendalian intern yang baik dapat dicerminkan dalam pertanggungjawaban pemerintah atas penggunaan dana untuk pelaksanaan pemerintah yang menjamin pelaksanaan kegiatan yang merata keseluruhan sektor publik dan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan secara ekonomis, efisien dan efektif.

Audit internal yang berkualitas menunjukkan pengawasan dan pengelolaan keuangan pemerintah yang jujur, transparan, baik dan bertanggungjawab. Apabila kualitas audit internal rendah maka akan memberikan celah pada lembaga pemerintah untuk melakukan kesalahan dan penyimpangan. Pengawasan intern dalam audit internal pemerintah dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah aparat

yang melakukan pengawasan melalui audit, *review*, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.

Salah satu bentuk kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), khususnya Inspektorat Kab/Kota saat ini adalah *me-review* laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD), berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Pasal 33 ayat (3) menyatakan bahwa : Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada Kementerian Negara/Lembaga/Pemerintah Daerah melakukan *review* atas Laporan Keuangan dan Kinerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang di sajikan sebelum disampaikan oleh Menteri/ Pimpinan Negara/ Gubernur/ Bupati/ Walikota kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam pasal 8 dan pasal 11. Dengan adanya pengawasan dari inspektorat akan menghasilkan laporan keuangan pemerintah yang baik dan berkualitas.

Pemeriksaan laporan yang dilakukan oleh APIP menginginkan adanya aparat pengawasan yang bersih, beribawa, tertib, dan teratur dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan dan norma yang berlaku. Norma dan ketentuan yang berlaku bagi auditor intern pemerintah terdiri dari kode etik APIP dan Standar Audit APIP. Kode etik dimaksud untuk menjaga perilaku APIP dalam melaksanakan tugasnya, sedang Standar Audit dimaksudkan untuk menjaga mutu hasil audit yang dilakukan APIP. Dengan adanya aturan tersebut, masyarakat atau pengguna laporan dapat menilai sejauh mana auditor pemerintah telah bekerja sesuai dengan standar dan etika yang telah ditetapkan.

Audit internal adalah suatu fungsi penelitian independen yang dibentuk dalam organisasi untuk memeriksa dan mengevaluasi kegiatan sebagai jasa bagi organisasi, tujuan audit internal untuk membantu anggota organisasi dalam melaksanakan tanggung jawab secara efektif (Guy-Alderman-Winter, edisi kelima:408), audit internal sering disebut sebagai mata dan telinga manajemen. Auditor internal tidak memeriksa kegiatan akuntansi dan keuangan, tetapi juga jenis program lainnya dalam entitas sehingga dapat meningkatkan kualitas audit. Audit internal harus transparan dan jujur dalam melaporkan temuan-temuan yang mungkin tidak menguntungkan dalam penilaian kinerja manajemen atau objek audit yang dilakukannya. Jika auditor internal melanggar kode etik mereka atau standar praktik profesional, akan mendapatkan sanksi . etika profesional harus lebih dari sekedar prinsip-prinsip moral. Etika ini meliputi standar perilaku bagi seorang profesional yang dirancang untuk tujuan praktis dan idealistik. Kode etik profesional dapat dirancang sebagian untuk mendorong perilaku yang ideal, sehingga harus bersifat realitis dan dapat ditegakkan, agar dapat memiliki arti maka keduanya harus dapat posisi diatas hukum, namun sedikit di bawah posisi ideal, (Boynton-Johnson-kell, edisi ketujuh:98). Auditor internal dituntut secara profesional untuk melakukan fungsi audit dengan baik. Pentingnya eksistensi seseorang auditor internal, menuntut auditor untuk memiliki independensi, objektif, pengetahuan dan pengalaman kerja dalam melaksanakan tugasnya.

Pada tahun 1941 menetapkan tanggung jawab dan mengembangkan atribut profesional bagi profesi audit internal yaitu IIA (Institute of Internal auditor), tujuan standar IIA, (Guy-Alderman-Winter, edisi kelima:413) :

1. Memberikan pemahaman tentang audit internal kepada pihak lain.
2. Menetapkan dasar pedoman dan pengukuran kinerja audit internal.
3. Memperbaiki praktik audit internal.

Kualitas audit adalah sikap auditor dalam melaksanakan tugasnya yang tercermin dalam hasil pemeriksaannya yang dapat diandalkan sesuai dengan standar yang berlaku. Hasil audit dikatakan berkualitas jika pemeriksaan audit dapat meningkatkan bobot pertanggungjawaban serta dapat memberikan informasi bukti ada tidaknya temuan penyimpangan dari standar-standar audit.

Independensi merupakan dasar dari profesi auditing. Hal ini berarti bahwa auditor akan bersikap netral terhadap entitas, oleh karena itu akan bersikap objektif. Publik dapat mempercayai fungsi audit karena auditor bersikap tidak memihak serta mengakui adanya kewajiban untuk bersikap adil, (Boynton-Johnson-kell, edisi ketujuh:66).

Seluruh auditor internal harus bersifat se-objektif mungkin ketika melaksanakan suatu audit. Masyarakat auditor internal untuk memiliki sikap mental objektif ketika melaksanakan audit. Akibatnya, auditor internal tidak boleh mengurangi pertimbangan atas suatu masalah audit dibawah pertimbangan lain (Guy-Alderman-Winter, edisi kelima:408). Objektifitas adalah suatu sikap mental, meskipun prinsip ini tidak dapat diukur secara tepat namun wajib untuk dipegang oleh semua anggota. Objektifitas berarti tidak memihak dan tidak berat sebelah dalam semua hal berkaitan dengan penugasan, (Boynton-Johnson-kell, edisi ketujuh:98).

Pengetahuan sangat penting untuk dimiliki oleh semua auditor, terlebih pengetahuan di bidang akuntansi dan auditing. Kedua pengetahuan tersebut merupakan dasar yang penting yang menjadi modal selama mereka bekerja sebagai seorang akuntan, terlebih pada saat melakukan pengauditan atas laporan keuangan. Pengetahuan audit bisa diperoleh dari berbagai pelatihan formal maupun dari pengalaman khusus, berupa kegiatan seminar, lokal karya, serta pengarahan dari auditor senior kepada auditor juniornya. Pengetahuan juga bisa diperoleh dari frekuensi seorang akuntan publik dalam melakukan pekerjaan dalam proses audit laporan keuangan. Seseorang yang melakukan pekerjaan sesuai dengan pengetahuan yang dimilikinya akan memberikan hasil yang lebih baik dari pada mereka yang tidak memiliki pengetahuan yang cukup memadai akan tugasnya.

Pengalaman kerja seseorang dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan seseorang dalam bekerja. Semakin sering seseorang melakukan pekerjaan yang sama, maka pengalaman kerja yang semakin terbentuk penyelesaian pekerjaannya semakin cepat. Auditor harus menjalani pelatihan yang cukup. Seorang auditor yang memiliki pengalaman kerja yang tinggi akan memiliki keunggulan dalam mendeteksi kesalahan, memahami kesalahan dan mencari penyebab munculnya kesalahan.

Berikut fenomena yang terjadi pada pemerintah dan bumh yang berkaitan dengan kualitas audit :

Tabel 1.1 Fenomena kualitas audit internal

No	Kasus	Isi
1.	Permasalahan berdampak finansial yang mengakibatkan kerugian negara. (Putri Adityo, Selasa, 3 Oktober 2017 12:15 WIB)	Badan Pemeriksa Keuangan menemukan 14.997 permasalahan yang berdampak finansial hingga Rp 27,397 triliun dari 687 Laporan Hasil Pemeriksaan yang diselesaikan. Temuan tersebut terangkum dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester 1 Tahun 2017. "Ini merupakan ikhtisar dari laporan hasil pemeriksaan yang terdiri atas 113 LHP pada pemerintah pusat, 537 LHP pemerintah daerah, dan 37 LHP BUMN serta badan lain," kata Ketua BPK, Moermahadi saat rapat paripurna pembacaan laporan di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa, 3 Oktober 2017. BPK mengaudit 645 laporan keuangan, 9 laporan kinerja, dan 33 laporan dengan tujuan tertentu sepanjang semester pertama tahun ini. Dari pemeriksaan tersebut, tercatat terdapat 9.729 temuan dengan 14.997 permasalahan yang terkategori atas kelemahan sistem pengendalian internal (SPI), ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, serta ketidakhematan dan ketidakefisienan. BPK mengumpulkan 4.707 permasalahan ketidakpatuhan senilai Rp 25,14 triliun yang mengakibatkan potensi kerugian, kerugian, kekurangan penerimaan, dan penyimpangan administrasi. Dari entitas pemerintah pusat, daerah, dan BUMN yang diperiksa, BUMN lah paling dominan melakukan ketidakpatuhan sehingga menimbulkan kerugian finansial sebesar RP 18,3 triliun. Selain itu, BPK menemukan 164 masalah senilai Rp 2,25 triliun ihwal tidak efisien dan efektifnya sebuah kementerian, lembaga, atau badan. Masalah ketidakefektifan mendominasi 75 persen, atau

		mencapai Rp 1,67 triliun. https://www.google.com/amp/s/bisnis.tempo.co/amp/1021622/semester-i-bpk-temukan-14-997-masalah-senilai-rp-2739-triliun
2.	DPRK menemukan kelemahan di inspektorat (tribunnews, Jumat, 02 September 2016, 22:55 WIB).	Kasus Salah satu anggota DPRK Aceh Tenggara menilai auditor Inspektorat masih lemah dalam mengawasi penggunaan anggaran, mulai dari pemkab, kecamatan sampai pedesaan. Bahkan, dana desa yang mencapai ratusan juta rupiah diduga diselewengkan atau juga hanya melibatkan beberapa orang yang dekat dengan kepala desa. Kepala Inspektur Aceh Tenggara, Sanudin kemarin mengaku tim auditor terbatas, hanya berjumlah 18 orang, yang seharusnya 48 orang atau lebih. Disebutkan, tim sedang memfokuskan pada program kerja tahunan SKPK sampai agustus dan setelah itu mulai memeriksa dana desa. Menurutnya, tim auditor sudah turun ke Desa Lawe Loning Hakhapen pada 16 Agustus 2016 untuk melihat proyek pembangunan gudang Serba Guna dengan anggaran Rp. 299.202.800. Masyarakat meminta bupati untuk menambah tenaga auditor, bahkan dapat memanfaatkan tenaga kontrak yang memiliki kemampuan dalam bidang auditor, para auditor harus bekerja profesional, karena jika tidak akan berdampak runtuhnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengawasan internal. http://aceh.tribunnews.com/2016/08/20/dewan-nilai-inspektorat-lemah
3.	Kejari Sesalkan Kinerja Inspektorat Pemkot Ambon (Redaksi rakyat maluku, Rabu, 30 Januari 2019)	TIM Penyelidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Ambon menyesalkan kinerja Tim Auditor Inspektorat Pemerintah Kota Ambon. Sebab, sejak tahun 2017 hingga saat ini pihak Inspektorat tak kunjung menerbitkan hasil audit kerugian keuangan negara dugaan penyelewengan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD)

	Urimessing, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, tahun 2016. “Di tahun 2018, kami sudah tiga kali menyurati pihak Inspektorat Pemkot Ambon untuk mempertanyakan hasil audit dugaan penyelewengan DD dan ADD Urimessing, namun sampai saat ini balasan suratnya belum juga dibalas. Jadi, kami sifatnya masih menunggu,” keluh Kepala Seksi (Kasi) Intelijen Kejari Ambon Sunoto, saat dikonfirmasi koran ini, di ruang kerjanya, Selasa, 29 Januari 2019. Dijelaskan, kepentingan hasil audit tersebut, selain untuk mengetahui ada tidaknya perbuatan yang menyebabkan kerugian keuangan negara, juga sebagai alat bukti guna dilakukan penetapan tersangkanya. “Hasil audit ini sangat penting untuk kita ketahui ada tidaknya perbuatan tindak pidana korupsi. Selain itu juga sebagai pendukung dua alat bukti guna dilakukan penetapan tersangkanya,” jelas Sunoto. Sebagaimana diberitakan koran ini sebelumnya, dari serangkaian penyelidikan didukung dengan sejumlah bukti-bukti dokument yang disita hingga pada On The Spot di lima dusun di Negeri Urimessing, serta dari pemeriksaan saksi pemilik Toko Lee (toko bangunan) Buce Salakay, terungkap bahwa Kaur Kamtibus Pemerintah Desa Urimessing, Sony alias Nixen selaku pelaksana kegiatan, diduga telah melakukan tindak pidana Mark Up atas pembelian alat-alat tukang menggunakan anggaran ADD dan ADD. Kepada Jaksa Penyelidik, Buce Salakay, mengaku bahwa saat membeli alat-alat tukang di tokonya tahun 2016 lalu, Sony alias Nixen meminta
--	--

		kepadanya untuk menaikkan harga satu item barang sebesar Rp 300 ribu pada nota pembelian, dengan alasan untuk biaya transportasi dan uang makan. Berdasarkan peruntukannya yang tertera pada laporan pertanggung jawaban, pengadaan alat-alat tukang yang telah habis dibelanjakan oleh Sony alias Nixen sebesar Rp 80.999.000 itu, seharusnya dibagikan kepada 10 kelompok di Desa Urimessing. Namun realisasinya hanya dibagikan kepada delapan kelompok saja. Dua kelompok dikategorikan fiktif. (RIO) https://rakyatmaluku.com/2019/01/kejari-sesalkan-kinerja-inspektorat-pemkot-ambon/
--	--	---

Berdasarkan fenomena-fenomena diatas, penulis dapat menarik kesimpulan pada fenomena pertama jika dikaitkan dengan dimensi kualitas audit internal maka pelaksanaan penugasan tidak sesuai dengan temuan yang ada, karena pelaksanaan penugasan tidak memberikan laporan yang sebenarnya sehingga dalam melakukan mengidentifikasi, menganalisis dan mendokumentasikan informasi tidak mencapai penugasan.

Kemudian pada fenomena ke dua, dapat dikaitkan dengan dimensi kualitas audit pemantaun tindak lanjut yaitu tidak adanya tanggung jawab fungsi audit internal dalam mengawasi penggunaan anggaran, mulai dari pemkab, kecamatan sampai pedesaan yang menyebabkan beberapa penyelewengan anggaran dana desa sehingga pelaksanaannya tidak terpantau dan mengakibatkan penyelewengan dana desa. Selain itu fenomena ini menyangkut kepada dimensi kualitas audit pengelola fungsi audit internal yang seharusnya dalam pelaksanaan

audit membutuhkan 48 orang auditor akan tetapi kenyataannya hanya 18 orang auditor menyebabkan dalam pengelolaan fungsi audit internal tidak berjalan efektif.

Fenomena terakhir membahas tentang Kejari sesalkan kinerja Inspektorat Pemkot Ambon, apabila dikaitkan dengan dimensi kualitas audit perencanaan penugasan inspektorat Ambon tidak memberikan hasil audit dengan tepat waktu sehingga menyebabkan pemeriksaan terhambat, karena hasil audit ini sangat penting untuk mengetahui ada atau tidaknya perbuatan tindak pidana korupsi. Selain itu hasil audit ini juga sebagai pendukung alat bukti guna penetapan tersangka. Pelaksanaan audit internal pada inspektorat Ambon dalam perencanaan penugasan tidak tepat sasaran waktu.

Berikut ini beberapa penelitian yang berhubungan dengan kualitas audit internal :

1. Annisa Parasayu (2014) dalam penelitian ini yang berjudul analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit internal. Hasil penelitian menunjukkan variabel bahwa independensi dan pengetahuan tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas hasil audit. Obyektivitas, pengalaman kerja, integritas dan etika audit berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.
2. Naomi Olivia Haryanto (2018) dalam penelitian ini yang berjudul pengaruh kompetensi, independensi dan profesionalisme auditor internal terhadap kualitas audit. Hasil penelitian menunjukkan variabel

bahwa kompetensi, independensi dan profesionalisme berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.

3. Rifqi Abdul Haq (2016) dalam penelitian ini yang berjudul pengaruh etika, kompetensi dan independensi terhadap kualitas audit. Hasil penelitian menunjukkan variabel bahwa etika tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas hasil audit. Kompetensi dan independensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis kali ini merupakan replikasi dari penelitian-penelitian sebelumnya. Penulis ingin mencoba menguji pengaruh independensi, objektif, pengetahuan dan pengalaman kerja terhadap kualitas audit pada Inspektorat Kabupaten Bandung. Pemilihan penelitian ini dilakukan karena kualitas audit internal sangat dibutuhkan. Dengan adanya kualitas audit internal yang sangat tinggi, maka akan menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul **“PENGARUH INDEPENDENSI, OBJEKTIVITAS, PENGETAHUAN DAN PENGALAMAN KERJA TERHADAP KUALITAS AUDIT (Survei pada Inspektorat Kabupaten Bandung) ”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka penulis merumuskan masalah yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan sebagai berikut :

1. Bagaimana Independensi Auditor Internal di Inspektorat Kabupaten Bandung .
2. Bagaimana Objektivitas Auditor Internal di Inspektorat Kabupaten Bandung.
3. Bagaimana Pengetahuan Auditor Internal di Inspektorat Kabupaten Bandung.
4. Bagaimana Pengalaman Kerja Auditor Internal di Inspektorat Kabupaten Bandung.
5. Bagaimana Kualitas Auditor Internal di Inspektorat Kabupaten Bandung
6. Berapa besar Pengaruh Independensi Auditor Terhadap Kualitas Audit di Inspektorat Kabupaten Bandung.
7. Berapa besar Pengaruh Objektivitas Auditor Terhadap Kualitas Audit di Inspektorat Kabupaten Bandung.
8. Berapa besar Pengaruh Pengetahuan Auditor Terhadap Kualitas Audit di Inspektorat Kabupaten Bandung.
9. Berapa besar Pengaruh Pengalaman Kerja Auditor Terhadap Kualitas Audit di Inspektorat Kabupaten Bandung.

1.3. Tujuan Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data-data, mencari dan mendapatkan informasi sehubungan dengan pengaruh independensi, objektivitas, pengetahuan dan pengalaman kerja auditor terhadap kualitas audit internal di Inspektorat Kabupaten Bandung. Adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu untuk mendapatkan bukti empiris mengenai :

1. Untuk mengetahui Independensi Auditor Internal di Inspektorat Kabupaten Bandung.
2. Untuk mengetahui Objektivitas Auditor Internal di Inspektorat Kabupaten Bandung.
3. Untuk mengetahui Pengetahuan Auditor Internal di Inspektorat Kabupaten Bandung.
4. Untuk mengetahui Pengalaman Kerja Auditor Internal di Inspektorat Kabupaten Bandung.
5. Untuk mengetahui Kualitas Auditor Internal di Inspektorat Kabupaten Bandung.
6. Untuk mengetahui pengaruh Independensi Auditor Terhadap Kualitas Audit di Inspektorat Kabupaten Bandung.
7. Untuk mengetahui pengaruh Objektivitas Auditor Terhadap Kualitas Audit di Inspektorat Kabupaten Bandung.
8. Untuk mengetahui pengaruh Pengetahuan Auditor Terhadap Kualitas Audit di Inspektorat Kabupaten Bandung.

9. Untuk mengetahui pengaruh Pengalaman Kerja Auditor Terhadap Kualitas Audit di Inspektorat Kabupaten Bandung.

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1. Kegunaan Praktis

Dengan diadakannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak yang membutuhkan, antara lain :

1. Bagi Penulis

Bagi penulis, penelitian ini berguna untuk menambah wawasan penulis khususnya mengenai Pengaruh Independensi, Objektif, Pengetahuan dan Pengalaman Kerja Terhadap Kualitas Audit Internal di Inspektorat Kabupaten Bandung. Selain itu, sebagai sarana bagi penulis untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh dalam bangku perkuliahan terutama yang berkaitan dengan judul dalam penelitian ini.

2. Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan dapat membantu Instansi dalam menilia Kualitas Audit Internal yang berkaitan dengan Independensi, Objektif, Pengetahuan dan Pengalaman Kerja Auditor.

3. Bagi Pihak lain

Menambah wawasan dan pengetahuan akuntansi khususnya dalam mata kuliah *auditing* dengan memberikan bukti tentang Pengaruh Independensi, Objektif, Pengetahuan dan Pengalaman Kerja Auditor

Terhadap Kualiatas Audit Internal. Memberikan informasi dan referensi kepada pihak-pihak lain yang ingin melakukan penelitian dan tertarik pada topik yang sejenis.

4. Bagi Instansi Pendidikan

Memperoleh informasi tentang kualitas yang dibutuhkan dunia kerja, seta sebagai alat evaluasi terhadap kurikulum yang digunakan.

1.4.2. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat kepada pengembangan ilmu ekonomi, khususnya dalam bidang akuntansi dan dapat menjadi bahan referensi dan perbandingan bagi penelitian selanjutnya mengenai Pengaruh Independensi, Objektif, Pengetahuan dan Pengalaman Kerja Auditor Terhadap Kualiatas Audit Internal.

1.5. Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini penulis melakukan peneltian yang bertempat di Inspektorat Kabupaten Bandung yang beralamatkan Jl. Soreang KM 17, Kabupaten Bandung.